

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A. (2021). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Institutional Digital Repository*. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17490>
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>
- Eldo, D. H. A. P., Habibullah, A., Zainudin, A., & Tasirin, T. (2022). Good village governance : Analysis implementation good governance in the Village Kupu, Brebes Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2021)*, 629(Icons 2021), 212–219. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220101.032>
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Repository Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–14. <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/177>
- Lastri, S., & Abdurrahman, R. (2021). Tata kelola pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Pendidikan ...*, 8(2). <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/12958>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18. <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/mewujudkan-good-governance.40>
- Meliala. (2020). Menuju good governance dengan Reinventing Government. *Jurnal Citizen Education*, 2(2), 1–11.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Musung, P. V., Ruru, J., & Londa, Y. V. (2014). Kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). *Administrasi Publik*, 4(63), 78–85.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *Al Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11(1), 48–59. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir>
- Puspitasari, T. (2013). Pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) terhadap kelemahan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah di Indonesia). *Universitas Islam Negeri*

Syarif Hidayatullah.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/23895>

- Putra, hendi S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Scientific Work*, 52(03), 125–130.
- Sedarmayanti, S. (2012). *Good governance dan good corporate governance bagian ketiga* (M. Maju (ed.)). CV Mandar Maju.
- Sofyani, H., Suryanto, R., Arie Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik pengelolaan dan tata kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jati.010101>
- Somali, S. G. (2021). Tata kelola pemerintahan desa village governance. *Journal.Unla*, 6, 141–152.
<http://journal.unla.ac.id/index.php/sospolunla/article/view/1853>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sunardi, S., Yanti, D., & Ariansyah, W. (2019). Pengaruh prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Akuntabilitas*, 13(2), 155–166.
<https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9516>
- Tampubolon, F. M. (2018). Pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Eprints Repository Software*.
<http://repository.unsada.ac.id/id/eprint/933>
- Taufiq, M., Sarsiti, S., Widyaningsih, R., & Hendriana, R. (2017). Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 137–146.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>
- Tomuka, S. (2012). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ulumiyah, I., Juli Andi Gani, A., & Indah Mindarti, L. (2018). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jap*, 1(5), 1–5.
- Warjiyati, S. (2018). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 64, 1–10.
- Admin Prokomsetda. 2017. Pengertian, Prinsip, dan Penerapan *Good Governance* di Indonesia.
<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>. 24 Mei 2022 (09.30 WIB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Undang-Undang Tentang Desa*. 15 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 10 November 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Jakarta.